

**ANALISIS FAKTOR PEMBERIAN KREDIT MODAL
KERJA PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V
PEKANBARU**

OLEH

RAHMAD HIDAYAT
00674005036



**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2010**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Metode Penelitian	5
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	5
2. Jenis dan Sumber Data	6
3. Metode Pengumpulan Data	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan	8
B. Struktur Organisasi Perusahaan	11
C. Tugas, wewenang dan tanggung jawab.....	14
D. Aktivitas Kantor Pusat PTP. V	19
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori.....	25
a. Pengertian Kredit	25
b. Unsur-unsur Kredit	27
c. Tujuan dan Fungsi Kredit	28
d. Jenis-jenis Kredit.....	33
e. Resiko Kredit	35
f. Prosedur Pemberian Kredit	38
g. Faktor-faktor Dalam Pemberian Kredit	40
B. Tinjauan Praktek	
a. Pengertian Kredit Modal Kerja	41
b. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kredit modal kerja	42
c. Proses Penyaluran Kredit Modal Kerja.....	54
d. Analisa Aspek-aspek.....	56
e. Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PTP. V.....	58
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan usaha dari suatu perusahaan akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana yang gunanya untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Sumber dana yang akan digunakan untuk pengembangan kegiatan itu dapat dikatakan sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor produksi lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, sumber bahan baku dan bahan penolong, kemampuan teknologi, manajemen dan sebagainya.

Sumber dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri maupun dari pinjaman. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemilik suatu kegiatan usaha dalam mengembangkan usahanya adalah dengan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana yang berbentuk perkreditan.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Melayu:2002;87).

Dengan lancarnya pemberian kredit kepada masyarakat usaha yang membutuhkan maka akan dapat menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi yang nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu hubungan antara pertumbuhan suatu

kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi perkreditan mempunyai koefisien korelasi yang erat, baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Bila dilihat dari sudut pandang lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana yang berbentuk perkreditan tersebut maka kredit mempunyai suatu kedudukan yang sangat istimewa terutama pada negara-negara yang sedang berkembang.

Sebagaimana yang kita ketahui pemberian kredit mempunyai resiko yang cukup tinggi yaitu tidak tertagihnya pokok pinjaman kredit dan bunganya sesuai dengan perjanjian. Untuk menghindari resiko kredit ini maka sebelum permohonan kredit yang di ajukan oleh nasabah dikabulkan maka diadakan proses analisa yang cermat, evaluasi terhadap faktor-faktor dan aspek-aspek yang berkenaan dengan pemberian kredit dan melakukan pengawasan yang efektif baik secara aktif maupun pasif mulai dari sebelum kredit diberikan (dicairkan) sampai kredit di lunasi.

Dengan melihat begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam mengambil keputusan terhadap pemberian kredit maka sudah pasti lembaga keuangan akan lebih memperhatikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kredit

Sesuai dengan keadaan Indonesia yang sedang mengalami efek krisis global maka kondisi ekonomi ini sangat diperhatikan sekali oleh penyedia dana dalam pemberian kredit. Hal ini disebabkan karena penilaian kondisi ekonomi dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian

suatu negara atau suatu daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif terhadap perusahaan yang memberikan kredit tersebut.

Oleh sebab itulah pihak penyedia dana harus memperhatikan betul kondisi keuangan usaha nasabah yang ingin meminjam dana kepada penyedia dana. Tindakan ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya resiko kredit yang tinggi yaitu tidak tertagihnya pokok kredit dan bunganya sesuai perjanjian.

Walaupun demikian sektor perkreditan tetap merupakan kegiatan yang penting dari suatu industri perbankan atau penyedia dana baik dinegara yang sedang berkembang maupun dinegara-negara yang telah maju. Ini disebabkan karena kredit sebagai salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha.

Pemberian kredit ini dapat dilakukan oleh bank pemerintah, bank swasta, maupun bank daerah atau penyedia dana lainnya. Salah satu penyedia dana yang memberikan kredit adalah perusahaan pemerintah seperti PT. Perkebunan Nusantara V. sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 21 : Menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Dimana PT. Perkebunan Nusantara V kegiatan usaha utamanya adalah mengelola perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian laba dari kegiatan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin dalam bentuk program CD dan juga pembiayaan

terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk pinjaman modal. Tentu dalam pemberian kredit modal kerja tersebut PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kesulitan atau masalah yang ditemui dalam pemberian kredit ini.

Dengan banyaknya kesulitan atau masalah yang ditemui dalam pemberian kredit tersebut penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk laporan dengan judul **“ANALISIS FAKTOR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU (PERSERO)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa dalam pengelolaan perkreditan tersebut mempunyai masalah-masalah yang cukup rumit. Oleh sebab itu untuk mengambil keputusan dalam menghadapi proses pemberian kredit ini maka perlu diadakan analisa pemberian kredit. Analisa ini perlu dilakukan secara kritis baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif terhadap semua aspek yang mempengaruhi kegiatan suatu jenis usaha.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu : faktor apa yang dominan dalam mempengaruhi pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru (Persero)?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang dominan dalam mempengaruhi pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru (Persero)
2. Untuk mengetahui apakah pemberian kredit modal kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir
- b. Bagi perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dalam hal penyaluran Kredit Modal Kerja
- c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru yang berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43. Penelitian dilakukan dari tanggal 01 desember s/d 06 Februari 2009 pada Bagian Akuntansi khususnya Akuntansi PUKK

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data pokok yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia di perusahaan berupa sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, aktifitas perusahaan,

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik :

- a. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru yaitu Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) atau PERSONALIA, Bagian AKUNTANSI dan Bagian PUKK dan BL
- b. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi milik perusahaan seperti penyaluran kredit modal kerja.
- c. Teknik penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan buku–buku referensi untuk tinjauan teori.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, pembahasan dalam laporan ini dibagi menjadi 4 bab. Pada setiap bab dirincikan kedalam beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas, wewenang serta tanggung jawab dan aktifitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Mengemukakan landasan teori dan praktek yang mendukung pembahasan diantaranya pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, resiko kredit, prosedur pemberian kredit, faktor-faktor dalam pemberian kredit.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang nantinya berguna dalam menjalankan pemberian kredit yang lebih baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT.Perkebunan Nusantara V

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V yang terletak di provinsi Riau. Perusahaan ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. tentang penyetoran modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara V. Anggaran dasar Perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil SH No.38 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8333 H. T. 01. 1996, dan tambahan berita Negara RI No.8565 / 1996. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01/ 2002 tanggal 01 Oktober 2002. perusahaan ini telah dapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan (SK) No. C-20923. HT. 01. 04. TH. 2002 tanggal 08 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam berita Negara RI No.75 tanggal 19 September dan tambahan berita Negara RI No. 8785 / 2003.

Sacara efektif, perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 09 April 1996, yaitu dengan dilantiknya Direksi dan Dewan komisaris secara lengkap oleh Menteri Pertanian RI. Saat ini Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. Rambutan No.43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau dan Kantor Perwakilan di Jl. Minangkabau No. 48 Jakarta Selatan. Dari tahun

2006 sampai sekarang, perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat, 7 unit Strategi Bisnis, 26 unit Kebun Inti atau Plasma, 12 Pabrik Kelapa Sawit, 3 Fasilitas Pengelola Karet dan 3 Rumah Sakit, 1 unit Palm Kernal Oil. Areal yang dikelola oleh perusahaan seluas 158.813 Ha, yang terdiri dari 80.116 Ha lahan sendiri atau inti dan 74.497 Ha lahan Plasma, dan 7.200 Ha lahan KKPA. PT.Perkebunan Nusantara V memiliki visi dan misi, adapun visi dan misinya adalah :

Visi adalah “ Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global “

Misi adalah “ Mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi “.

Selain visi dan misi perusahaan juga mengusung nilai-nilai yang menjadi motivasi bagi seluruh anggota internal perusahaan. Selain itu perusahaan juga mengelola bisnis secara transparan, menjaga kepercayaan yang telah diperoleh dari pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait. Sampai saat ini karyawan perusahaan berjumlah 16.073 orang. Sebagai perusahaan yang bergerak disektor industri hulu yang mengedepankan padat karya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal penting bagi perusahaan. Iklim usaha yang terus berubah mendorong perusahaan untuk meningkatkan mutu SDM agar tetap bersaing di pasar global.

Setiap perusahaan pasti juga memiliki logo atau lambang yang memiliki makna tersendiri bagi perusahaan tersebut.



Seperti yang terlihat di atas, maka dapat didefinisikan secara garis besar makna logo PT.Perkebunan Nusantara V, yaitu :

1. Tiga helai daun kecambah kelapa sawit melambangkan PT.Perkebunan Nusantara V terbentuk sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP asal, yaitu PTP II, PTP IV, dan PTP V yang berdomisili di Provinsi Riau.
2. Warna kuning pada daun kecambah kelapa sawit melambangkan hasil produksi PT.Perkebunan Nusantara V yaitu CPO (Crude Palm Oil).
3. Lima akar kecambah kelapa sawit melambangkan PT.Perkebunan Nusantara V yang baru tumbuh dan terus berkembang.
4. Lingkaran yang betuliskan PT.Perkebunan Nusantara V menggambarkan kesatuan dan persatuan yang menyeluruh.
5. Warna hijau menggambarkan ruang lingkup usaha adalah di bidang pertanian/ perkebunan.

B. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan proses menetapkan dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan dan melimpahkan tanggung jawab an wewenang dengan maksud untuk memungkinkan organisasi bekerja dengan efektif dan efisien.

Organisasi sebagai sarana bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan, harus disusun dengan tepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung segala aktivitas perusahaan. Dengan adanya organisasi sebuah perusahaan menjadi tempat atau sarana untuk melakukan aktivitas perusahaan dan tidak terjadinya pemupukan tugas terhadap masing-masing fungsi dalam perusahaan tersebut. Cerminan agar garis

perintah tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab digambarkan dalam struktur organisasi.

Di dalam struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian kerja dan hubungan kerja sama antar fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang dengan kedudukan, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang berbeda serta kepada siapa bertanggung jawab untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penanganan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya pada suatu perusahaan.

Struktur organisasi yang tepat sangat membantu mengembangkan kerja sama dan mempersiapkan suatu rangka dasar pekerjaan, sehingga anggota organisasi dapat bekerja sama dengan efisien dan efektif dari sudut pandang manajemen yang baik, struktur organisasi garis mempunyai bentuk dan tujuan nyata serta mudah dipahami oleh setiap organisasi. Dengan demikian struktur organisasi tersebut akan berjalan dengan baik dalam membantu tercapainya tujuan organisasi secara umum.

Menurut ahli manajemen seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antar kelompok kerja dan menetapkan tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat serta sesuai dengan keadaan kerja.

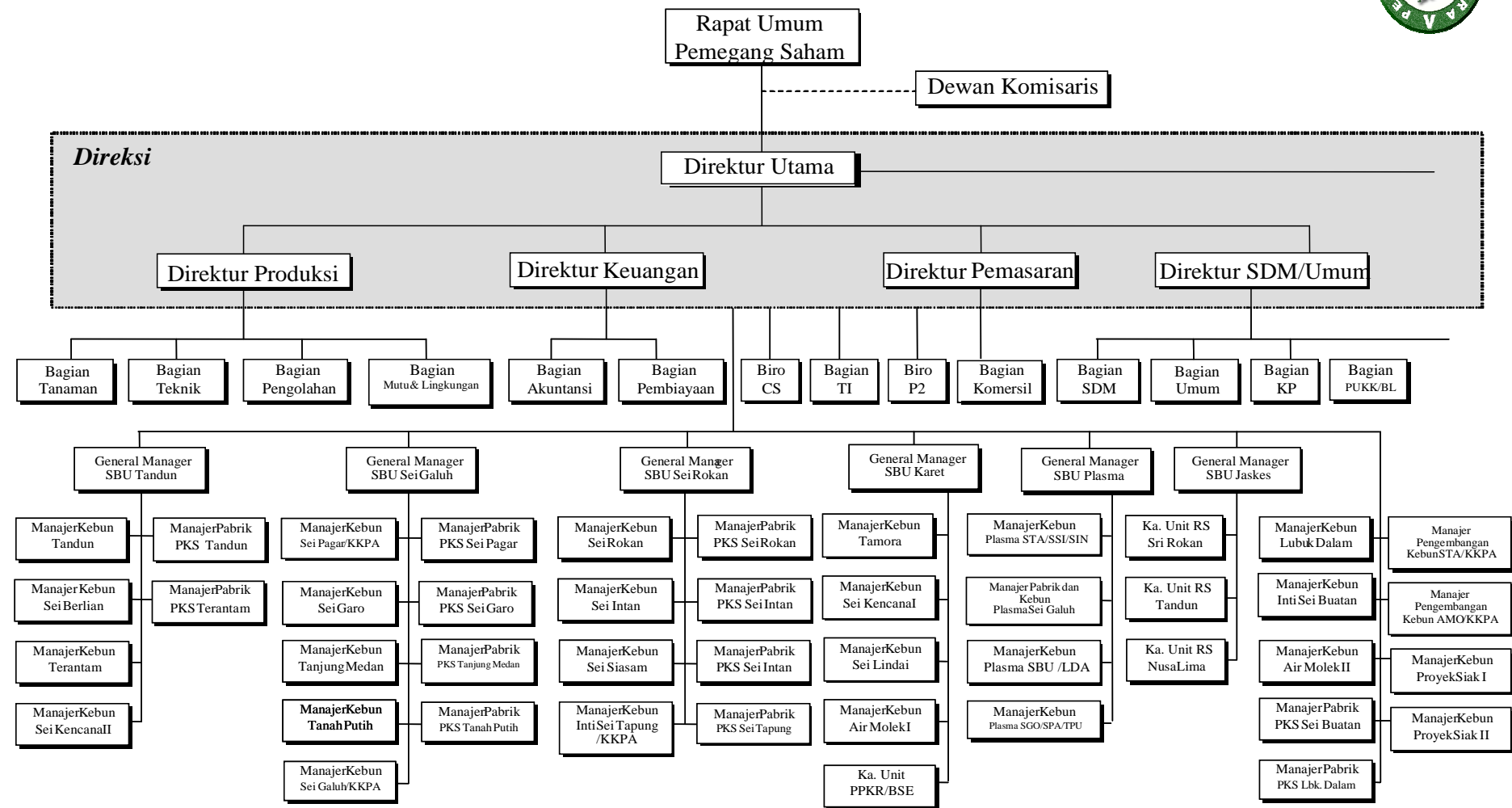
Jadi sangat jelaslah bahwa struktur organisasi sangat mendukung dan menentukan perkembangan suatu perusahaan. Struktur organisasi yang dipilih memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru adalah Struktur Garis dan Staf (Lini dan Staf). Struktur organisasi garis dan staf merupakan penyempurnaan bentuk organisasi garis.

Bentuk organisasi ini digunakan karena perusahaan ini cukup besar dan memiliki wilayah kerja yang luas. Struktur organisasi yang dibuat sedemikian rupa agar perusahaan dapat menciptakan suatu kondisi kerjasama yangn baik antar bagian dan saling mendukung untuk pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi tersebut.

Selama penulis melakukan penelitian, penulis ditempatkan di Bagian PUKK dan BL adapun struktur organisasi PT.Perkebunan Nusantara.

STRUKTUR ORGANISASI PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (Persero)



Keterangan :
 : Garis Komando
 : Garis Pengawasan dan Pembinaan

Keterangan Singkatan :

- SPI : Satuan Pengawas Intern
- CS : Corporate Secretary
- TI : Teknologi Informasi
- KPK : Kemitraan Dan Pengembangan Kebun
- SDM : Sumberdaya Manusia
- PUKK/BL : Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi/Bina Lingkungan
- Jaskes : Jasa Kesehatan
- SBU : Strategic Business Unit

C. Wewenang dan Tanggungjawab

Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan serta bagian di PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS ini berfungsi sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan sbagai pusat pengawasan terhadap jalannya kegiatan perusahaan. RUPS ini dilakukan di Jakarta bersama Menteri Negara BUMN dan Direksi.

2. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi dan pengolahan sepenuhnya dilaksanakan oleh para Direksi untuk kepentingan pemegang saham.
- b. Menetapkan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar.

Wewenang Dewan Komisaris adalah dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- a. Menyampaikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para Direksi.
- b. Memeriksa laporan hasil kerja usaha perusahaan .

3. Direktur Utama

Direktur Utama memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan strategis perusahaan sebagai mana dituangkan dalam rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana operasional lainnya, agar diperoleh sasaran kinerja dan tujuan dalam mencapai visi dan misi PTPN V.
- b. Merencanakan, membina dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi organisasi perusahaan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan berdasarkan prinsip, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengawasan untuk pengamanan dan pembinaan kekayaan perusahaan dalam arti luas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Wewenang Direktur Utama adalah sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai pimpinan umum perusahaan, mengkoordinir kegiatan anggota direksi dalam mengendalikan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Biro Stuan Pengawas Intern.

Tanggung jawab Direktur Utama adalah menyiapkan dan menyajikan laporan hasil kerja usaha perusahaan yang merupakan neraca dan daftar laba/rugi serta laporan lainnya secara berkala kepada pemegang saham.

4. Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran, & Renbang dan SDM

Empat direktur ini hanya beda pada bagiannya saja, yaitu bagian Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbang dan SDM, tapi mereka memiliki uraian tugas, wewenang, tanggung jawab yang sama.

Uraian tugas Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbang dan SDM adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis dan operasional sesuai rencana untuk pencapaian sasaran kinerja dan tujuan perusahaan.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran yang disediakan direktorat serta menindak lanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kepentingan perusahaan.

Wewenang dari Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbang dan SDM adalah membimbing dan mengembangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia.

Tanggung jawab Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran dan SDM adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan, menyusun dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan dan kepentingan perusahaan.
- b. Menyiapkan dan menyajikan laporan kemajuan atau hasil kerja untuk laporan direksi kepada pemegang saham, dewan komisaris maupun instansi terkait lainnya.

5. Kepala Bagian

Kepala Bagian memiliki tugas untuk menyusun rencana dan strategi perusahaan dibidang satuan pengawasan Intern untuk jangka waktu lima tahun (RJP 5 tahun) serta menyusun lebih rinci RJP 5 tahun tersebut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya.

Wewenang Kepala Bagian adalah untuk mengidentifikasikan seluruh aspek kegiatan perusahaan, untuk kemudian berdasarkan data yang terkait melakukan analisis untuk menentukan kemungkinan terjadinya ketidak efisienan, penyimpangan dan ketidak wajaran. Berdasarkan hak tersebut ditentukan prioditas kemungkinan yang dapat di waspandai.

Tanggung jawab Kepala Bagian adalah untuk menyusun prosedur dan kebijakan di lingkungan.

6. Kepala Urusan

Kepala Urusan memiliki uraian sebagai berikut :

- a. membuat kajian tentang perusahaan.
- b. Membuat evaluasi dan uji kelayakan.
- c. Bekerja sama dengan Kepala Bagian untuk melakukan evaluasi terhadap perancangan dan pengembangan.

Wewenang dari Kepala Urusan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada perusahaan melalui Kepala Bagian.

Tanggung jawab Kepala Urusan adalah :

- a. Menerima tugas-tugas dengan segala kebijakan pelaksanaannya dari kepala bagian dan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada Kepala Bagian.
- b. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian atau Kebun.

7. Asisten

Asisten memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menilai prestasi kerja karyawan bawahannya dan mengajukan penilaian karyawannya tersebut ke Kepala Urusan dan Kepala Bagian.
- b. Memeriksa laporan harian produksi.
- c. Menjalankan kegiatan-kegiatan atas perintah Kepala Urusan dan Kepala Bagian.

Wewenang Asisten adalah

- a. Melakukan pengawasan terhadap kerja karyawan anggota.
- b. Berhak menandatangani surat-surat yang dianggap penting apabila Kepala Urusan tidak ada ditempat.

Tanggung jawab Asisten adalah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Urusan.

D. Aktifitas Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada sejarah singkat PT. Perkebunan Nusantara V, bahwa PTPN V merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan. Komoditas andalan yang di usahakan perusahaan adalah kelapa sawit

dan karet. Selain itu, mulai tahun 1999 perusahaan mulai menanam sagu. Pada tahun 2001 komoditi kakao dikonvensa ke komoditi kelapa sawit.

Perusahaan mengolah agroindustri kelapa sawit dan karet serta mengolah hasilnya menjadi CPO, inti sawit, dan berbagai jenis prodak karet. Semua hasil produksi dijual kepasar lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran perusahaan bersama seluruh BUMN Perkebunan membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV yang berkedudukan di Jakarta dan juga indoham Jerman.

Salah satu yang mendukung aktifitas yang dilakukan oleh PTPN V dengan cara mengelolah bisnis secara transparan, menjaga kepercayaan yang telah diperoleh dari pemegang saham dan pihak-pihak terkait. Secara bertahap perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bukan hanya sebagai kewajiban tetapi merupakan kebutuhan dalam memelihara keberlangsungan pertumbuhan usaha.

Berbagai langka dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah mulai dilingkungan perusahaan, melalui :

1. Trasparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profersional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekana dari pihak manapun yang

tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban unit sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak semata-mata bertujuan memenuhi kepentingan pemegang saham (*stakeholder*), namun juga memperhatikan keselarasan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Manajemen berkeyakinan bahwa eksistensi dan operasi perusahaan harus memberi manfaat bagi para stakeholdernya. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diwujudkan melalui :

- a. Bina Lingkungan, sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tempatan dan sekaligus membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. Bentuk bantuan bina lingkungan yang diberikan kepada masyarakat dilingkungan perusahaan diberikan bagi sektor pendidikan, sektor kerohanian, sektor kesehatan, sektor olahraga, sektor kesenian, bantuan untuk bencana alam dan infrastruktur.

- b. Protek Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), sesuai misi perusahaan untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, perlu perhatian terpusat ke bidang stabilitas dan pamarataan pembangunan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah membangun kebun kelapa sawit pola KKPA dengan kelembagaan koperasi sejumlah 12 KUD, dan telah terealisasi hingga tahun 2007 seluas 7.200 Ha.
- c. Petani Plasma, hubungan antara perusahaan dan petani telah berlangsung lama dalam mengelolabisnis kelapa sawit. Perusahaan memberikan pembinaan manajemen dan bantuan teknis kepada petani plasma sekitar kebun. Keberadaan perusahaan merupakan salah satu faktor dalam meraih sukses dan memberikan standar kehidupan yang lebih baik bagi petani. Pada tahun 2004 sekitar 28.341 KK petani kelapa sawit dan 10.331 KK petani karet turut serta dalam mengelola areal kebun seluas 74.526 Ha. Pada tahun yang sama perusahaan juga mengembangkan Rp. 566 M bagi pembelian TBS petani plasma.
- d. Proyek Siak, perusahaan mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (PemKab) Siak dalam program pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat setempat. Peroyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran serta merupakan nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Siak.

- e. Pengelolaan lingkungan hidup, dalam menjalankan operasinya, perusahaan mengupayakan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada setiap kegiatan produksi.
- f. Keselamatan Kerja, perusahaan mengembangkan manajemen keselamatan kerja melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Untuk memastikan efektifitas pelaksanaan sistem tersebut. Perusahaan melaksanakan audit SMK3 secara berkala, baik internal maupun dengan mengundang auditor eksternal (dari PT. Sucifindo). Hasil audit eksternal telah membuahkan hasil berupa sertifikat emas tahun 2004 disampaikan oleh Wakil Presiden M. Jusup Kalla kepada delapan PKS di lingkungan perusahaan.
- g. Manajemen Mutu, perusahaan menetapkan ISO 9001 ssebagai upaya untuk menimhkatkan mutu hasil produksi, secara terus menerus perusahaan melaksanakan revisi dokumen, annual, prosedur dokumen pendukung ISO 9001 : Versi 2000
- h. Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun, perusahaan tidak memberlakukan karyawan sebagai faktor produksi, namun sebagai mitra dalam menjalankan operasi perusahaan. Melalui wadah Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), karyawan melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKS) dengan perusahaan,. Kesejahteraan karyawan menjadi salah satu perhatian utama. Perusahaan, melalui penyediaan fasilitas kerja, peribadatan, olahraga, dan pendfidikan bagi keluarga perusahaan. Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik di tiap kebun dan tiga rumah sakit perusahaan, serta menjaminkerja

sama dengan RS Swasta maupun Pemerintah. Perusahaan menyediakan paket remunerasi yang kompetitif karyawan. Selain gaji di atas Upah Minimum Regional Propinsi (UMR), perusahaan menyediakan tunjangan perumahan, tunjangan rekreasi, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Perusahaan juga mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi jiwa atau kecelakaan dan jamsostek. Program pensiun yang diikuti oleh karyawan adalah program manfaat pasti (*definet benefit*) yang memiliki kondisi keuangan yang bagus.

- i. PUKK / Kemitraan, pembangunan berkelanjutan yang dilakukan bagi masyarakat setempat sebagai bagian sosio-eko nasional seiring dengan prinsip ekonomi Kerakyatan. Setiap tahunnya perusahaan menempatkan 2%-3% dari keuntungan bersih setelah pajak untuk memberikan bantuan secara aktif (mulai keahlian manajemen sampai aspek teknis) sebagaimana dipersyaratkan RUPS bagi pembantu pengusaha kecil setempat / koperasi.

Disamping mengelola kebun sendiri, perusahaan juga bermitra usaha dengan petani plasma, yaitu melakukan pembelian hasil produksi. Kebun plasma berupa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan cup lump karet dari 7 kebun plasma. Untuk pengolahan produksi, perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 3 unit pabrik pengolahan karet. Untuk fasilitas kesehatan perusahaan memiliki 3 unit Rumah Sakit.

Sejak tahun 2000 perusahaan menambah kontribusi langsung kepada masyarakat melalui pembangunan kebun plasma kelapa sawit pola KKPA. Direncanakan mencapai luas 36.330 Ha untuk 18.165 KK yang bergabung dalam 13

KUD, dan tersebar di Provinsi Riau. Secara administratif, wilayah kerja perusahaan terletak di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Jadi dasar dari kredit itu adalah kepercayaan. Seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) akan percaya bahwa penerima (debitur) dimasa datang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Sedangkan kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberi sekarang. **(Thomas suyatno 2003;12)**

Disini terlihatlah bahwa ada prestasi dan kontraprestasi dalam kredit. Dengan akan diterimanya kontraprestasi dimasa yang akan datang, maka kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Atau dengan kata lain kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain dan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Jadi terlihatlah bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memusatkan prestasi dan kontraprestasi.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Sedangkan kemampuan untuk sesuatu yang diinginkan terbatas, maka diperlukanlah

bantuan dalam bentuk pemodalan. Bantuan dari bank atau penyedia modal dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut dengan kredit.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut **yulhendri, (2005;20)** mengatakan bahwa :

Kredit adalah kepercayaan yang diberikan pihak pemberi kredit (kreditur) kepada penerima (debitur) untuk memperoleh dan menggunakan kredit yang diberikan serta dipercaya bisa mengembalikan fasilitas tersebut dikemudian hari.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. **(Melayu:2002;87).**

Sedangkan kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.**(kasmir 2001:76)**

b. Unsur-unsur kredit.

Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang ataupun jasa akan benar- benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

Dalam Al-Quran dijelaskan :

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh

sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari fasilitas kredit bank tentu mengharapakan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. (Kasmir:2002;103-104).

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan akan tergantung pada falsafah yang dianut oleh Negara itu sendiri. Misalnya di Negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan

prinsip ekonomi yang dianut oleh Negara yang bersangkutan yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.

Sedangkan di Indonesia yang menjadi dasar dan falsafahnya adalah Pancasila, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan melainkan sesuai dengan tujuan Negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut tersimpul unsur pokok yang saling berkaitan.

Kedua unsur itu adalah : **(Thomas suyatno dkk, 2003; 15)**

Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bankl maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan berbagai sektor, terutama sector riil.

Tujuan pemberian kredit menurut **(Suhardjono:2003;161)**.

Tujuan pemberian kredit tersebut oleh bank pemerintah adalah:

1. Turut mengsucceskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan tercermin dan dapat memperluas usahanya.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- a). Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- b). Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau peluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

- c). Meningkatkan barang dan jasa
- d). Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk yang sebelum diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
- e). Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai oleh keperluan ekspor.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan suatu yang berguna.

2. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.

3. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambahkan atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat membesar atau memperluas usahanya.

dalam hal meningkatkan pendapatan.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia. **(Kasmir:2002;106)**

Selain faktor diatas terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penyaluran kredit yaitu :

1. Aspek teknis
2. Aspek hukum
3. Aspek pasar
4. Aspek politik dan sosial

(Martono, 2004:60)

d. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu : **(Thomas suyatno dkk,2003:25)**

1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya

kredit ini terdiri dari 3 jenis :

- a. Kredit Konsumtif

yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

b. Kredit Produktif

yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

c. Kredit Perdagangan

yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas :

1. Kredit perdagangan dalam negeri
2. Kredit perdagangan luar negeri

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya.

a. Kredit jangka pendek

yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun

b. Kredit jangka menengah

kredit jangka menengah yakni kredit berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buru, suku cadang dan lain-lain.

Kredit jangka waktu menengah diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada perusahaan golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

c. Kredit jangka panjang

kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitas, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.

e. Resiko Kredit

Dalam setiap bentuk usaha akan selalu dihadapi pada resiko. Hal ini sudah merupakan suatu hal yang biasa dimanapun selalu terdapat adanya resiko, walaupun satu sama lainnya mempunyai bobot yang berbeda-beda. Begitu juga dalam pemberian kredit ada terkandung resiko yang perlu terlebih dahulu dipahami dalam proses perencanaan kredit, karena resiko ini akan menjadi kendala bagi keberhasilan proses perkreditan tersebut.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pemberian kredit oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit oleh bank. Karena pemberian kredit itu bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank maka resiko yang dihadapi oleh bank juga dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat.

Berbagai bentuk resiko yang perlu dipahami oleh bank adalah : **(H. Rachmat firdaus dkk,2004;34)**

1. Resiko Usaha

Berbagai jenis usaha, masing-masing mempunyai resiko berbeda-beda. Secara umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi biasanya mengandung resiko tinggi pula. Sebaliknya jenis usaha yang tingkat keuntungannya rendah maka resikonyapun rendah. Tinggi rendahnya resiko usaha dapat ditentukan dengan berbagai kriteria antara lain ;

- a. Makin tinggi turnover usaha maka semakin tinggi resikonya
- b. Semakin spesifik atau khusus suatu bidang usaha maka semakin tinggi resikonya
- c. Makin besar investasi pada aktiva lancar atau modal kerja maka semakin tinggi pula resiko bila dibandingkan dengan usaha investasinya pada barang-barang modal
- d. Usaha dengan padat modal pada Negara berkembang akan mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga. Tetapi pada Negara-negara maju, usaha padat karya akan mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang padat modal.
- e. Karena sifat dari pekerjaan itu sendiri yang mempunyai resiko tinggi misalnya pengeboran minyak bumi dilepas pantai.

2. Resiko Geografis

Resiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana alam misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industri yang berlokasi berdekatan dengan gunung berapi atau dekat muara sungai yang sering banjir. Tetapi ada juga resiko yang timbul bukan diakibatkan dari bencana alam tetapi karena faktor lingkungan. Misalnya mendirikan industri di daerah pemukiman, dalam kondisi ini akan terdapat resiko diprotes oleh masyarakat sekeliling karena menimbulkan polusi.

3. Resiko Politik

Banyak kegagalan perkreditan karena tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas, oleh karenanya analisis tentang kestabilan politik suatu daerah atau Negara akan cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan usaha dimasa akan datang.

4. Resiko Inflasi

Pada masa inflasi yang tinggi bank akan menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah walaupun utang pokok ditambah bunganya telah dibayar lunas oleh nasabah. Hal ini merupakan ancaman terhadap modal bank karena dengan adanya inflasi laba bank akan over stated dan akan mengakibatkan pembagian laba yang semakin tinggi.

5. Resiko ketidakpastian

Masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti. Salah satu unsure kredit adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan waktu pembayaran kembali sehingga resiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat.

6. Resiko Persaingan

Adalah sesuatu yang wajar bagi setiap unit bisnis yang baru masuk kedalam industri maupun telah berada dalam industrinya selalu akan dihadapkan dengan persaingan. Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitur/pengusaha yang benar-benar dapat memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis. Kalau tidak, maka kredit bakal kembali akibat perusahaan debitur menurun volume usahanya dan menderita rugi akibat langganan-langganannya keperusahaan pesaingnya.

f. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur tentang pemberian kredit dapat dilakukan dengan cara :

1. Analisa Kredit

Merupakan pondasi dari manajemen perkreditan sehingga harus dijadikan dasar untuk :

- a. Mengendalikan resiko kredit
- b. Menentukan struktur fasilitas kredit
- c. Sebagai sarana pengambilan keputusan yang sehat

2. Persetujuan kredit

Persetujuan kredit ini pada dasarnya adalah :

- a. Merupakan sarana pengendalian resiko
- b. Merupakan sarana proses manajemen perkreditan
- c. Cermin kemampuan pengendalian kredit
- d. Hasil akhirnya memperlihatkan hasil kualitas perkreditan secara keseluruhan

Proses persetujuan kredit ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas pengendalian dan efektifitas proses pengelolaan untuk memperkecil resiko kredit
- b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan cara memperbaiki atau menyederhanakan proses persetujuan (pengambilan keputusan) kredit.

Persetujuan kredit mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah nasabah yang layak, meliputi :

- a. Kelayakan kredit
- b. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit
- c. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit
- d. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya
- e. Sesuai dengan kewenangan memutus kredit

g. Faktor faktor dalam pemberian kredit

Setelah bank memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit dari nasabahnya maka perlu terlebih dahulu mengadakan evaluasi terhadap resiko perkreditan yang mungkin timbul. Adapun maksud dari penilaian terhadap permohonan kredit itu adalah untuk meletakkan kepercayaan dan menghindari hal-hal yang tidak mungkin diinginkan dikemudian hari apabila pengembalian kredit ternyata tidak dapat dilunasi. Dalam melakukan penilaian terhadap pemberian kredit tersebut ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh pihak bank. Faktor-faktor itu dikenal dengan 5C atau ada juga yang menyebutnya dengan 5C yaitu : **(Kasmir, 2003:117-119)**

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seorang nasabah tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya. Dilihat dari latar belakang nasabah seperti pekerjaannya dan cara hidupnya
2. *Capacity*, merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit
3. *Capital*, harus menganalisis dari sumber-sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman

4. *Condition*, penilaian kondisi dan prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
5. *Callateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

B. TINJAUAN PRAKTEK

a. Pengertian Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Adapun kredit modal kerja ini berawal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 21 : “...Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyesihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Setiap tahunnya perusahaan menempatkan 2%-3% dari keuntungan bersih setelah pajak untuk memberikan bantuan secara aktif (mulai keahlian manajemen sampai aspek teknis) sebagaimana dipersyaratkan RUPS bagi pembantu pengusaha kecil setempat atau koperasi.

b. Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja

Dalam pemberian kredit mengandung suatu resiko yang tinggi, untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi itu maka PT. Perkebunan Nusantara V melakukan penganalisaan dan memperhatikan factor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum permohonan kredit dikabulkan. Faktor-faktor tersebut sesuai dengan teorinya yang biasa dikenal dengan 5C. factor factor itu adalah :

1. *Character* (watak atau kepribadian)

Penilaian soal karakter ini akan bermanfaat bagi PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikat baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. Untuk menilai character ini memang sulit karena setiap manusia mempunyai watak yang berbeda-beda. Oleh karena itulah para pengelola kredit PT.Perkebunan Nusantara V harus juga mempunyai keterampilan psikologis praktis untuk dapat menilai watak dari calon debiturnya

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh PT Perkebunan Nusantara V untuk mengetahui gambaran dari calon debitur diantaranya adalah:

1. Meneliti daftar riwayat hidup
2. Meneliti reputasi calon debitur itu dilingkungan usahanya
3. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah itu bergantung.

4. Meneliti apakah calon debitur itu juga anggota atau sering datang ketempat-tempat perjudian.
5. Mengamati sejauh mana ketekunan kerja, hobby yang dimilikinya apakah senang pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berfoya-foya.

Setelah mendapatkan data-data tersebut seorang analis kredit dapat menyimpulkan bagaimana watak kepribadian dari calon debitur yang mengajukan permohonan kredit tersebut.

PT Perkebunan Nusantara V tidak memiliki standarisasi khusus dalam menilai karakter calon debitur, standarisasi yang dipakai secara umum adalah “Baik”, setelah analisis mencari data dan informasi yang lengkap baik itu dari tetangga-tetangga, rekan kerja debitur dan lain-lain, dari hasil analisis terakhir debitur dapat dikatakan baik.

2. *Capacity* (kemampuan)

Pengukuran *capacity* dari calon debitur yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan melakukan pendekatan

- a. Menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi untuk beberapa besarnya solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas usahanya serta tingkat resiko usahanya.
- b. Menilai latar belakang pendidikan para pengusaha yang menggunakan kemampuan teknologi tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan dan lain-lain.

- c. Menilai apakah usaha calon debitur selalu menunjukkan kegagalan dari waktu-kewaktu.
- d. Bagaimana tingkat persaingan calon debitur dengan perusahaan lain dengan jenis usaha yang sama. Beberapa pangsa pasar yang dikuasai perusahaan.
- e. Apakah perkembangan omset penjualan menunjukkan tingkat kenaikan pemodal yang wajar.
- f. Apakah sumber daya yang telah dipergunakan seoptimal mungkin.

3. *Capital* (modal)

PT perkebunan Nusantara V dapat melihat besar kecilnya capital ini dari neraca perusahaan yaitu pada komponen laba yang ditahan, dan lain-lain. Selain itu juga bisa dilihat dari akta pendirian dan akta perubahan untuk perusahaan yang baru didirikan. Sedangkan untuk perusahaan perorangan, PT Perkebunan Nusantara V dapat daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi dengan utang yang diterimanya.

Dalam hal ini yang akan diperhatikan oleh PT Perkebunan Nusantara V dalam penilaian capital ini adalah:

- a. Apakah laporan keuangan (neraca dan laba-rugi) telah diaudit oleh akuntan publik yang dipercaya.
- b. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.
- c. Ratio angka baik horizontal maupun vertical apakah wajar dan menunjukkan trend naik.

- d. Menilai pos-pos lain yang dianggap perlu dianalisa sesuai dengan kondisi bisnis yang sedang berlaku.

Standarisasi yang dipakai oleh PT. Perkebunan Nusantara V adalah apakah analisa laporan keuangannya dapat dikatakan likuid, ini dapat dilihat dari analisa-analisa ratio yang dilakukan.

Analisa yang dilakukan terhadap laporan keuangan calon debitur ini bertujuan untuk menilai apakah usaha yang akan dibiayai dengan kredit itu akan dapat menghasilkan keuntungan yang memadai bagi usaha calon debitur. Hal ini sangat penting diketahui untuk menjamin dapat atau tidaknya kredit itu dilunasi oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Terlebih dahulu yang dianalisa oleh analis kredit PT. Perkebunan Nusantara V adalah laporan laba rugi dari perusahaan calon debitur. Apabila dalam beberapa periode terakhir perusahaan berlaba maka analisa akan diteruskan terhadap laporan keuangan lainnya, tapi jika beberapa periode terakhir perusahaan mengalami kerugian maka kredit yang diajukan ditolak.

4. *Collateral* (jaminan atau agunan)

PT. Perkebunan Nusantara V dalam penilaian jaminan ini akan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. kalau terjadi likuidasi apakah nilai harga lelang sifatnya bias menutupi pinjaman baik pokok pinjaman maupun bunga yang timbul.

- b. Kalau pemilik jaminan itu terdiri dari suami istri maka perlu semua surat-surat yang berhubungan dengan pengadaan barang-barang jaminan yang ditandatangani oleh keduanya.
- c. Jika barang jaminan diasuransikan, maka harus diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup.

5. *Condition Of Economy*

PT. Perkebunan Nusantara V penilaian terhadap condition of economy ini dimaksud untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu Negara atau suatu daerah yang akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak negatif terhadap perusahaan yng memperoleh kredit.

Contoh Form 5 C Pada PT. Perkebunan Nusantara V

Kepada Yth : Anggota Kredit Modal Kerja

Dari : Pembina Kredit

Perihal : Permohonan kredit A/n marzon sebesar Rp.15.000.000,-

Tanggal : 13 oktober 2009

Tujuan

Proposal ini diajukan berdasarkan permohonan mendapatkan fasilitas kredit saudara Marzon tanggal 06 Agustus 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- yang akan dipergunakan untuk modal kerja.

Data Pemohon

Nama : Marzon

Alamat Rumah : Dsn. I Batu Belah

Alamat Tempat usaha : Jl. Raya Bangkinang-Pekanbaru Desa Batu Belah

Bidang Usaha : Rumah Makan (Restoran)

Koperasi : Anggota Koperasi

Fasilitas Kredit : Pertama

Legalitas Usaha

Secara yuridis yang bersangkutan dapat melakukan tindakan hukum, dan memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. (Analisa Yuridis Terlampir)

Evaluasi Kredit

Performance / character

- a. Debitur telah menjalankan usahanya lebih kurang 10 tahun yang dirintis oleh debitur sendiri.
- b. Berdasarkan wawancara dan informasi yang diperoleh, calon debitur mempunyai karakter yang baik, giat dan terampil.
- c. Yang bersangkutan sekarang berusia 32 tahun
- d. Debitur memiliki tempat usaha sendiri di Jl. Raya Bangkinang-Pekanbaru Desa Batu Belah Kab. Kampar

Kapasitas / Capacity

Dari kemampuan pribadi dalam pengelolaan usaha yang telah dijalani selama ini, Sdr. Marzon dapat menjalani usahanya dengan baik, terlihat omzet rata-rata perbulan yang cukup besar yang bisa dilihat di Laporan Rugi Laba yang mana Sdr. Marzon memperoleh keuntungan bersih tiap bulannya setelah disusun laporan keuangan Neraca dan Rugi Laba beserta proyeksinya diketahui kapasitas calon debitur mampu untuk mengembalikan pinjaman dengan perincian sbb :

- a. Laba/Kewajiban : 6,2 kali score 5
- b. Laba/Bunga : 32 kali score 5
- c. Dana sendiri : 0,8 % score 1
- d. Perp. Piutang : 0 kali score 5
- e. Perp. Persediaan : 12 kali score 5

21

(Analisa Kredit Terlampir).

Modal (Capital)

Dilihat dari laporan keuangan yang disusun secara sederhana maka saya memperkirakan total aktiva yang dimiliki calon debitur sebesar Rp. 117.000.000,- yang terdiri dari Aktiva Lancar Rp. 9.000.000,- dan Aktiva Tetap sebesar Rp. 108.000.000,- .

Jaminan / Collateral

Untuk memback up kredit ini, yang bersangkutan menyerahkan jaminan berupa : satu unit kendaraan Roda Empat dengan bukti kepemilikan BPKB A No. 2326404 No Pol B 1608 ZV merk Toyota Corona Jenis Mobil Penumpang Model Sedan Tahun 1994 Warna Biru Metalik No Mesin : 3S-1804059 No. Rangka : MHF53STK109019604 An. Drs Adhika Sulistiyono (Milik Debitur BBN) Alamat Ds. I Batu Belah Kab. Kampar.

Taksasi CI : Rp. 40.000.000,-

Perbandingan total jaminan terhadap kredit : 2,6 : 1

Kondisi / Condition Of Economy

Dilihat dan berdasarkan survey yang dilakukan benar usaha ini ada dan sudah berjalan lebih kurang 10 tahun dengan usaha kedai nasi (restoran).

Kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh calon debitur dinilai bagus, karena usaha debitur ramai dikunjungi konsumen dan mempunyai pelanggan yang tetap. Dan saat ini debitur ingin menambah dan memperluas tempat usahanya yang telah ada yaitu memperbaiki dan merehap bangunan yang ada. Debitur ingin menambah stok barang-barangnya seperti halnya minuman-minuman lainnya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oleh karena itu debitur ingin mendapatkan tambahan modal usaha dari PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.

Penggunaan Dana

Dana yang akan dipinjam pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru akan digunakan untuk penambahan modal usaha.

Rincian kegunaan dana terlampir

Sumber Pengembalian

Sebelum mendapatkan pinjaman dari PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, hasil penjualan barang dan jasa rata-rata sebesar Rp. 30.000.000,- diperoleh laba kotor sebesar Rp. 7.500.000,- setelah ditambah pendapatan lain Rp. 2.000.000,- dan dikurangi biaya-biaya Rp. 3.000.000,- maka diperoleh laba bersih sebesar Rp. 6.500.000,- Apabila yang bersangkutan mendapatkan pinjaman dari PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru maka diperkirakan pendapatan akan lebih meningkat sebesar 25 % dari keuntungan sebesar Rp. 1.6625.000,- maka total pendapatan menjadi Rp. 8.125.000,-

Analisa Resiko

Resiko yang mungkin terjadi antara lain :

- a. Penyalahgunaan terhadap dana (kredit) yang diberikan solusinya dimonitor.
- b. Tidak dibayarnya kewajiban oleh debitur, solusinya menjual jaminan.
- c. Meninggal dunia (debitur), solusinya asuransi jiwa.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi singkat diatas maka dapat kami simpulkan bahwa :

- a. Usaha ini layak untuk diberikan kredit.
- b. Secara tidak langsung dapat meningkatkan portofolio kredit PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru
- c. Dapat meningkatkan citra Koperasi di mata masyarakat yang dampaknya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi sebagai landasan perekonomian Indonesia.
- d. Akan makin baiknya pelayanan Koperasi terhadap anggotanya, khususnya simpan pinjam.

Rekomendasi

Dari hasil analisa singkat diatas maka kami mengusulkan kepada anggota kredit agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada saudara Marzon dengan ketentuan sebagai berikut :

Kredit modal kerja

Plafond	:	Rp. 15.000.000,-
Kegunaan	:	Modal Kerja
Suku Bunga	:	9 % flat (5.000.000,-) & 21,6 % Eff (10.000.000) pertahun
Jangka Waktu	:	18 Bulan
Angsuran / Bulan	:	Rp. 1.055.000,-

Persyaratan

- a. Sesuai dengan Comment Kredit modal kerja
- b. Demikian permohonan ini kami ajukan kepada anggota kredit atas persetujuan, tanggapan dan saran yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan hasil penelitian, faktor yang paling menentukan dalam pemberian kredit ini adalah faktor *capital* (modal). Karena faktor *capital* sangat menentukan apakah calon debitur sanggup untuk mengembalikan modal beserta bunganya dan juga faktor ini dijadikan sebagai tolak ukur berapa kredit tersebut diberikan.

c. Proses Penyaluran Kredit Modal Kerja

Dalam pengajuan kredit modal kerja, calon debitur harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi persyaratan :

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir permohonan kredit
- b. Menyerahkan pas photo 3x4 suami dan istri
- c. Menyerahkan photocopy KTP suami dan istri
- d. Menyerahkan photocopy kartu keluarga
- e. Surat keterangan dari lurah, SITU/HO, SIUP, TDP, TDUP.
- f. Menyerahkan agunan atau jaminan

Jangka waktu :

Kredit modal kerja mempunyai jangka waktu kredit maksimal 3 tahun

Sanksi :

Dalam pemberian kredit modal kerja ini apabila angsuran pinjaman tidak dilunasi tepat waktu maka akan dikenakan denda 2% perbulan dari jumlah yang tertunggak.

Suku bunga :

kredit modal kerja memiliki suku bunga 6% pertahun yang harus ditanggung oleh para debitur

Proses Permohonan Kredit**1. Register permohonan**

Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku catatan penerimaan permohonan selanjutnya disertai tanda bahwa bukti permohonan kredit telah diterima

2. Penelitian kelengkapan permohonan

Setelah permohonan diterima wajib segera dilakukan pengecekan dan penelitian kelengkapan data permohonan kredit dan data keterangan pendukung lainnya.

3. Peninjauan usaha calon debitur

Peninjauan keusaha calon debitur langsung oleh pinsi atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengumpulan data sebagai bahan dalam rangka pembahasan kredit

4. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara individu atau perorangan yang dilakukan langsung antara petugas wawancara dengan pemohon kredit

5. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dianalisis oleh analis kredit, kemudian analis kredit membuat rekomendasi kepada kepala bagian secara berjenjang

6. Penandatanganan akad kredit atau realisasi kredit

Setelah kelengkapan pemohon dipenuhi serta telah dipersiapkan perjanjian kredit, maka demikian dapat dilaksanakan penandatanganan akad kredit

Untuk debitur kelompok perjanjian harus ditandatangani oleh pengurus kelompok dalam hal ini ketua kelompok, sekretaris kelompok dan bendaharawan kelompok.

7. Keputusan kredit

Berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh petugas maka pejabat yang berwenang akan memutuskan apakah kredit disetujui atau ditolak.

8. Wewenang menyetujui fasilitas kredit, sesuai batas wewenang yang telah ditetapkan direksi.

d. Analisa Aspek-Aspek

1. Aspek hukum

Analisa aspek hukum dilakukan agar PT. Perkebunan Nusantara V memperoleh keyakinan atas legalitas calon debitur, badan usaha dan koperasi

Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dalam analisis aspek hukum antara lain dengan meneliti sebagai berikut :

- a. Legalitas Pemilik, pemegang saham dan pengurus usaha pemohon berupa bukti diri dari NPWP
- b. Bentuk hukum badan usaha pemohon, apabila berupa perusahaan perorangan, koperasi.
- c. Akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama hak, wewenang dan kewajiban direksi
- d. Pemenuhan persyaratan sebagai badan hukum
- e. Legalitas perusahaan berupa perizinan-perizinan yang harus dimiliki

2. Aspek Manajemen

Analisa aspek manajemen dilakukan agar PT. Perkebunan Nusantara V memperoleh keyakinan atas sifat, karakter, integritas, kapasitas serta pengalaman pihak manajemen dalam mengelola usahanya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dalam analisa aspek manajemen antara lain dengan meneliti :

- a. Pribadi pemilik, pemegang saham dan pengurus perusahaan

- b. Informasi-informasi yang didapat dari perbankan maupun dari sumber lainnya
- c. Kemampuan manajemen melalui data laporan keuangan masa lalu
- d. Struktur organisasi antara lain prinsip internal control
- e. Staffing dan pengisian struktur organisasi sekarang, saat masa konstruksi dan saat masa komersial yaitu jumlah dan kualifikasinya
- f. Struktur permodalan sekarang dan yang baru dalam rangka pembiayaan
- g. Latar belakang pendirian perusahaan

3. Aspek teknis

Analisa aspek teknis dilakukan agar PT. Perkebunan Nusantara V memperoleh keyakinan, apakah secara teknis perusahaan calon debitur mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan biaya sebagaimana yang direncanakan

4. Aspek pemasaran

Analisis aspek pemasaran dilakukan agar PT. Perkebunan Nusantara V memperoleh keyakinan apakah barang atau jasa yang dihasilkan oleh calon debitur masih mempunyai peluang pasar.

e. Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V

Tabel 1.1.
Kredit Modal Kerja Yang Telah Disalurkan PT. Perkebunan Nusantara V

No.	KOTA/ KABUAPTEN	1996 S/D 2006		2007		2008		2009	
		UNIT	Rp. 000	UNIT	Rp. 000	UNIT	Rp. 000	UNIT	Rp. 000
PROPINSI RIAU									
1.	PEKANBARU	304	5,584,500	54	1,037,500	23	447,000	89	1,719,000
2.	KAMPAR	295	4,679,651	38	795,000	22	500,000	65	1,270,000
3.	INDRAGIRI HULU	130	1,499,504	9	175,000	27	337,500	23	337,000
4.	INDRAGIRI HILIR	60	575,000	0	0	0	0	0	0
5.	BENGKALIS	75	762,499	0	0	0	0	0	0
6.	ROKAN HULU	152	3,278,075	29	568,000	35	708,000	16	245,000
7.	ROKAN HILIR	15	272,500	8	114,000	14	258,000	9	172,000
8.	SIAK	96	1,755,000	10	330,000	30	707,000	91	2,382,500
9.	KUANTAN SINGINGI	37	497,500	17	249,000	24	339,000	0	0
	JUMLAH	1.164	18,904,229	165	3,268,500	175	3,296,500	293	6,125,500

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa total penyaluran kredit modal kerja mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan karena unit yang diberikan setiap tahunnya meningkat. Seperti yang dapat kita lihat bahwa pada tahun 2007 unit yang diberikan sebanyak 165 meningkat 10 unit pada tahun 2008 sebesar 175 dan begitu juga pada tahun 2009 meningkat sebesar 118 unit peningkatan ini sangat tinggi ini dikarenakan dalam pemberian kredit modal kerja ini PT. Perkebunan Nusantara V tidak terlalu menekankan kepada penerima kredit. Dalam pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja ini PT. Perkebunan Nusantara V tidak terlalu melihat pada kelengkapan permohonannya akan tetapi dilihat dari hasil survey lapangan apakah si pemohon kredit layak diberikan atau tidak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dari factor 5C tersebut faktor yang paling dominan mempengaruhi dalam pemberian kredit ini adalah faktor *capital* (modal). Karena faktor *capital* sangat menentukan apakah calon debitur sanggup untuk mengembalikan modal beserta bunganya pada waktu yang ditetapkan dan juga faktor ini dijadikan sebagai tolak ukur berapa kredit tersebut layak diberikan.

Selain factor 5C analisa aspek-aspek juga dibutuhkan dalam melakukan penganalisaan sebagai tambahan informasi bagi analis PT. Perkebunan Nusantara V. dengan menganalisa aspek-aspek tersebut banyak kemungkinan-kemungkinan yang didapat sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan pemberian kredit yang diusulkan calon debitur.

Dalam pemberian kredit modal kerja ini peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa pemberian kredit setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada tahun 2007-2008 mengalami peningkatan dari 3.268.500.000 menjadi 3.296.500.000.

B. Saran

Dari uraian diatas dapatlah penulis memberikan suatu saran yaitu :

1. Analisis kredit PT. Perkebunan Nusantara V juga harus memperhatikan kelengkapan administrasi perkreditan dari debitur. Hal ini dilakukan agar bisa meminimalisir kredit yang macet nantinya.
2. setelah dana tersebut disalurkan kepada debitur hendaknya PT. Perkebunan Nusantara V melakukan pengevaluasian terhadap usaha debitur.
3. PT. Perkebunan Nusantara V hendaknya selalu melakukan penyaluran kredit modal kerja ini agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Rachmat. 2004. *manajemen perkreditan bank umum*. Alfabeta : Bandung
- Kasmir . 2001. *Dasar-dasar perbankan*. PT. Grafindo Persada : Jakarta
- _____. 2002. *Bank dan lembaga keuangan lainnya* . PT. Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2003. *Dasar-dasar perbankan*. PT. Grafindo Persada : Jakarta
- Melayu, Hasibuan 2002. *Dasar-dasar perbankan*. PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Martono, 2004. *Dasar-dasar perkreditan*. Alfabeta : Bandung
- Suyatno, Thomas. 2003. *Dasar-dasar perkreditan*. PT. Gramedia : Jakarta
- Suharjono, 2003. *Manajemen perkreditan usaha kecil dan menengah*. UPP AMP
YKPN : Yogyakarta
- Yulhendri. 2005. *manajemen perkreditan*. PT. Raja Grafindo persada : Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Kredit Modal Kerja Yang Telah Disalurkan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V	13